



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1901 / SEK/SK.PW1/XII/2024

TENTANG

PENETAPAN HASIL EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) SECARA MANDIRI TAHUN
2024 PADA 259 (DUA RATUS LIMA PULUH SEMBILAN) SATUAN KERJA

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa telah diusulkan sebanyak 259 (dua ratus lima puluh sembilan) satuan kerja di bawah Mahkamah Agung sebagai satuan kerja menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK);
- b. bahwa terhadap 259 (dua ratus lima puluh sembilan) satuan kerja di bawah Mahkamah Agung tersebut telah dilakukan rangkaian evaluasi terhadap proses dan hasil pembangunan zona integritas menuju WBK secara mandiri;
- c. bahwa terhadap seluruh tahapan hasil evaluasi atas pembangunan zona integritas menuju WBK secara mandiri juga telah melalui supervisi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam rapat panel final dan *clearance*;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang

Penetapan Hasil Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK secara Mandiri Tahun 2024 pada 259 (Dua Ratus Lima Puluh Sembilan) Satuan Kerja;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
 6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden

Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;

8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Instansi Pemerintah;
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 387 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Proyek Percontohan (*Pilot Project*) Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi secara Mandiri Tahun 2023 untuk Instansi Pemerintah Pelaksana Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*);
11. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 03 Tahun 2024 tentang Teknis Pengusulan Unit/Satuan Kerja menuju WBK/WBBM dan Pelaksanaan Survei Mandiri Zona Integritas Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN HASIL EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) SECARA MANDIRI TAHUN 2024 PADA 259 (DUA RATUS LIMA PULUH SEMBILAN) SATUAN KERJA.

- KESATU : Menetapkan Hasil Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Secara Mandiri Tahun 2024 pada 259 (Dua Ratus Lima Puluh Sembilan) Satuan Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Desember 2024

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,



SUGIYANTO

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
4. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
5. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1901/SEK/SK.PW1/XII/2024
TANGGAL : 23 Desember 2024

HASIL EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI (WBK) SECARA MANDIRI PADA 259 (DUA RATUS LIMA
PULUH SEMBILAN) SATUAN KERJA

A. RINGKASAN HASIL EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTERGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) SECARA MANDIRI DI
LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2024

Ringkasan hasil evaluasi atas usulan Zona Integritas menuju WBK secara
mandiri di lingkungan Mahkamah Agung tahun 2024 sebagai berikut:

No	Tahapan Evaluasi	Jumlah Unit Kerja	Keterangan
1	Permintaan Evaluasi dari Sekretaris MA RI kepada Tim Penilai Nasional dan Tim Penilai Internal (Evaluasi Mandiri), untuk mengevaluasi 259 (dua ratus lima puluh sembilan calon unit kerja berpredikat WBK.	259	Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui surat Nomor 3012/SEK/OT1/V/2024 tanggal 30 Mei 2024 Hal Pengajuan Usulan Calon Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) untuk Evaluasi Mandiri;
2	Unit Kerja yang Tidak Memperoleh Predikat WBK (Evaluasi Mandiri)		Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 387 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Proyek Percontohan (<i>Pilot Project</i>) Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi secara Mandiri Tahun 2023 untuk Instansi

No	Tahapan Evaluasi	Jumlah Unit Kerja	Keterangan
			Pemerintah Pelaksana Sistem Peradilan Pidana (<i>Criminal Justice System</i>)
	a. Unit Kerja tidak memenuhi seleksi administrasi	144	Unit kerja yang tidak memenuhi kriteria pengusulan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 tahun 2023, serta telah diumumkan dalam Surat Pengumuman Tim Penilai Internal Nomor 1087/BP/PW.1.1.1/IX/2024 tanggal 03 September 2024 tentang Hasil Seleksi Administrasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) secara mandiri tahun 2024 dan Surat Pengumuman Tim Penilai Internal Nomor 1101/BP/PW.1.1.1/IX/2024 tanggal 10 September 2024 tentang Hasil Sanggah atas Seleksi Administrasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) secara mandiri tahun 2024 meluluskan 115 (seratus lima belas) atau 44,40% (empat puluh empat koma empat nol persen) dari total calon unit kerja berpredikat WBK untuk mengikuti evaluasi pada tahap selanjutnya yakni <i>Desk</i>

No	Tahapan Evaluasi	Jumlah Unit Kerja	Keterangan
			<i>Evaluation</i> – Analisis Dokumen LKE dan Data Dukung.
	b. Unit Kerja yang tidak memenuhi kriteria <i>Desk Evaluation</i> – Analisis Dokumen LKE dan Data Dukung	75	Unit kerja yang tidak memenuhi kriteria Analisis Dokumen LKE dan Data Dukung, serta telah diumumkan dalam Surat Pengumuman Tim Penilai Internal Nomor 1161/BP/PW.1.1.1/X/2024 tanggal 02 Oktober 2024 tentang Hasil Penilaian (<i>Desk Evaluation</i>) – Analisis Dokumen Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), sebanyak 75 (tujuh puluh lima) unit kerja atau sebanyak 28,96% (dua puluh delapan koma sembilan puluh enam persen). Sisanya sebanyak 40 (empat puluh) atau 15,44% (lima belas koma empat puluh empat persen) dari total calon unit kerja berpredikat WBK mengikuti evaluasi pada tahap selanjutnya yakni <i>Desk Evaluation</i> – Wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 07 Oktober 2024 sampai dengan 11 Oktober 2024.

No	Tahapan Evaluasi	Jumlah Unit Kerja	Keterangan
	c. Unit Kerja yang tidak memenuhi kriteria <i>Desk Evaluation</i> – Wawancara dan Verifikasi Lapangan	13	Unit kerja yang tidak memenuhi kriteria <i>Desk Evaluation</i> – Wawancara dan Verifikasi Lapangan sebanyak 13 (tiga belas) atau 5,02% (lima koma nol dua persen) dari total calon unit kerja berpredikat WBK.
	d. Unit Kerja yang tidak lulus <i>Clearance</i>	3	Unit Kerja yang tidak lulus <i>clearance</i> dari KPK, BIN dan/atau ORI
3	Unit Kerja yang memperoleh predikat WBK	24	Unit Kerja yang diusulkan meraih predikat WBK sebanyak 24 (dua puluh empat) atau 9,27 (sembilan koma dua puluh tujuh persen) dari total calon unit kerja berpredikat WBK.

Jumlah unit kerja yang lulus sebanyak 24 (9,27%) dan unit kerja yang tidak lulus sebanyak 235 (90,73%).

B. DAFTAR SATUAN KERJA YANG DINYATAKAN TIDAK LULUS SELEKSI ADMINISTRASI ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK

1.a. Lingkungan Peradilan Umum - Tingkat Banding

No	Nama Unit Kerja	Catatan Evaluator
1	Pengadilan Tinggi Gorontalo	1. LKE Manual namun tidak ada catatan maupun link data dukung 2. Laporan survey menggunakan format lama IKM dan IPAK (tidak sesuai format SE Menpan No 4 Tahun 2023)
2	Pengadilan Tinggi Jayapura	LKE Manual, namun nilai belum diisi dan belum ada catatan/penjelasan/keterangan diberikannya nilai pada setiap sub komponen
3	Pengadilan Tinggi Kupang	- LKE belum menggunakan format LKE Manual tetapi menggunakan LKE dari aplikasi pmpzi.mahkamahagung.go.id . Tidak ada penjelasan alasan pemberian nilai pada setiap sub komponen dan tidak ada tautan data dukung. - Periode Survei Triwulan I Tahun 2024 dan tidak ada laporan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan, namun yang disampaikan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat.
4	Pengadilan Tinggi Manado	• LKE Manual belum ada catatan/penjelasan/keterangan diberikannya nilai pada setiap sub komponen • Terdapat 1 Aparatur terlambat melaporkan SPT Pajak 2023 yang baru dilaporkan 6 Mei 2024
5	Pengadilan Tinggi Padang	LKE belum menggunakan format LKE Manual tetapi menggunakan LKE dari

		aplikasi pmpzi.mahkamahagung.go.id.
6	Pengadilan Tinggi Samarinda	• LKE belum menggunakan format LKE Manual tetapi menggunakan LKE dari aplikasi pmpzi.mahkamahagung.go.id dan tidak ada penjelasan alasan pemberian nilai pada setiap sub komponen • Survei dilaksanakan tidak sesuai dengan kebijakan Dirjen Badilum berdasarkan surat nomor 1115/DJU/OT1.6/IV/2024 tanggal 17 April 2024 Hal Pengisian Survei Mandiri dan Penilaian Evaluasi Mandiri Zona Integritas

1.b. Lingkungan Peradilan Umum - Tingkat Pertama

No	Nama Unit Kerja	Catatan Evaluator
1	Pengadilan Negeri Ende	• LKE menggunakan LKE dari aplikasi pmpzi.mahkamahagung.go.id dan tidak ada penjelasan alasan pemberian nilai pada setiap sub komponen. • Survei dilaksanakan tidak sesuai dengan kebijakan Dirjen Badilum berdasarkan surat nomor 1115/DJU/OT1.6/IV/2024 tanggal 17 April 2024 Hal Pengisian Survei Mandiri dan Penilaian Evaluasi Mandiri Zona Integritas • TLHP belum 100%
2	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	- LKE belum menggunakan format LKE Manual tetapi menggunakan LKE dari aplikasi pmpzi.mahkamahagung.go.id

No	Nama Unit Kerja	Catatan Evaluator
		- Periode Survei Triwulan I Tahun 2024 dan tidak ada Laporan Hasil Survei sesuai format namun hanya informasi hasil survei
3	Pengadilan Negeri Kudus	• LKE Manual belum ada catatan/penjelasan/keterangan diberikannya nilai pada setiap sub komponen; • Survei dilaksanakan tidak sesuai dengan kebijakan Dirjen Badilum berdasarkan surat nomor 1115/DJU/OT1.6/IV/2024 tanggal 17 April 2024 Hal Pengisian Survei Mandiri dan Penilaian Evaluasi Mandiri Zona Integritas
4	Pengadilan Negeri Lhokseumawe	Laporan Suvey menggunakan format lama (IKM dan IPAK) dan periode Survey TW I (Januari-Maret 2024)
5	Pengadilan Negeri Limboto	LKE Manual belum ada catatan/penjelasan/keterangan diberikannya nilai pada setiap sub komponen dan tidak ada tautan data dukung
6	Pengadilan Negeri Maumere	• Tautan Dokumen LKE tidak dapat diakses • Periode Survei Triwulan I Tahun 2024 dan hanya Pelaporan SPAK saja dan tidak ada Laporan SPKP nya sehingga tidak sesuai dengan persyaratan format laporan survei.
7	Pengadilan Negeri Muara Teweh	• LKE Manual, namun tidak ada nilai • Survei dilaksanakan tidak sesuai dengan kebijakan Dirjen Badilum berdasarkan surat nomor 1115/DJU/OT1.6/IV/2024 tanggal 17 April 2024 Hal Pengisian

No	Nama Unit Kerja	Catatan Evaluator
		Survei Mandiri dan Penilaian Evaluasi Mandiri Zona Integritas
8	Pengadilan Negeri Pagar Alam	LKE Manual kosong, tidak ada catatan atau link data dukung
9	Pengadilan Negeri Palembang	• LKE Manual belum ada catatan/penjelasan/keterangan diberikannya nilai pada setiap sub komponen; • Survei dilaksanakan tidak sesuai dengan kebijakan Dirjen Badilum berdasarkan surat nomor 1115/DJU/OT1.6/IV/2024 tanggal 17 April 2024 Hal Pengisian Survei Mandiri dan Penilaian Evaluasi Mandiri Zona Integritas
10	Pengadilan Negeri Purbalingga	Tidak ada Laporan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) sehingga tidak sesuai dengan kebijakan Dirjen Badilum berdasarkan surat nomor 1115/DJU/OT1.6/IV/2024 tanggal 17 April 2024 Hal Pengisian Survei Mandiri dan Penilaian Evaluasi Mandiri Zona Integritas
11	Pengadilan Negeri Sanggau	- LKE manual namun tidak sesuai format dan tidak ada catatan atas nilai yang diberikan. - TLHP belum 100%
12	Pengadilan Negeri Suka Makmue	- LKE Manual belum ada catatan/penjelasan/keterangan diberikannya nilai pada setiap sub komponen; - Tidak ada Laporan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) sehingga tidak sesuai dengan kebijakan Dirjen Badilum berdasarkan surat nomor 1115/DJU/OT1.6/IV/2024 tanggal

No	Nama Unit Kerja	Catatan Evaluator
		17 April 2024 Hal Pengisian Survei Mandiri dan Penilaian Evaluasi Mandiri Zona Integritas
13	Pengadilan Negeri Tegal	LKE Manual belum ada catatan/penjelasan/keterangan diberikannya nilai pada setiap sub komponen
14	Pengadilan Negeri Airmadidi	LKE Manual belum ada catatan/penjelasan/keterangan diberikannya nilai pada setiap sub komponen
15	Pengadilan Negeri Amurang	- Laporan Survei TW I (Januari-Maret) tidak sesuai format (SE Menpan No.4 Tahun 2023) - TLHP belum 100%
16	Pengadilan Negeri Atambua	- LKE Manual belum ada catatan/penjelasan/keterangan diberikannya nilai pada setiap sub komponen - Terdapat Aparatur yang belum menyampaikan LHKPN - Tidak ada Laporan SPKP dan SPAK sesuai dengan kebijakan Dirjen Badilum berdasarkan surat nomor 1115/DJU/OT1.6/IV/2024 tanggal 17 April 2024 Hal Pengisian Survei Mandiri dan Penilaian Evaluasi Mandiri Zona Integritas
17	Pengadilan Negeri Batam	- LKE Manual belum ada nilai, belum ada catatan/penjelasan/keterangan diberikannya nilai pada setiap sub komponen dan tidak mencantumkan tautan data dukung - Tidak ada Laporan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) sehingga belum sesuai dengan kebijakan Dirjen

No	Nama Unit Kerja	Catatan Evaluator
		Badilum berdasarkan surat Nomor 1115/DJU/OT1.6/IV/2024 tanggal 17 April 2024 Hal Pengisian Survei Mandiri dan Penilaian Evaluasi Mandiri Zona Integritas
18	Pengadilan Negeri Batulicin	Tidak ada Laporan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) sehingga belum sesuai dengan kebijakan Dirjen Badilum berdasarkan surat Nomor 1115/DJU/OT1.6/IV/2024 tanggal 17 April 2024 Hal Pengisian Survei Mandiri dan Penilaian Evaluasi Mandiri Zona Integritas
19	Pengadilan Negeri Baturaja	LKE Manual tidak bisa diakses (dibuka)
20	Pengadilan Negeri Batusangkar	LKE menggunakan LKE dari aplikasi pmpzi.mahkamahagung.go.id dan tidak ada penjelasan alasan pemberian nilai pada setiap sub komponen
21	Pengadilan Negeri Bukittinggi	LKE Manual belum ada catatan/penjelasan pada setiap sub komponen
22	Pengadilan Negeri Cilacap	Tidak ada Laporan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) sehingga tidak sesuai dengan kebijakan Dirjen Badilum berdasarkan surat Nomor 1115/DJU/OT1.6/IV/2024 tanggal 17 April 2024 Hal Pengisian Survei Mandiri dan Penilaian Evaluasi Mandiri Zona Integritas
23	Pengadilan Negeri Demak	LKE Manual belum ada catatan/penjelasan pada setiap sub komponen
24	Pengadilan Negeri Gresik	• LKE Manual belum ada catatan/penjelasan/keterangan

No	Nama Unit Kerja	Catatan Evaluator
		diberikannya nilai pada setiap sub komponen dan tidak ada tautan data dukung • Periode survei (SPAK dan SPKP) Triwulan I Tahun 2024
25	Pengadilan Negeri Kab. Kediri	Periode survei (SPAK dan SPKP) Triwulan I Tahun 2024 dan laporan survei diterbitkan 1 April 2024 sehingga tidak sesuai dengan kebijakan Dirjen Badilum berdasarkan surat Nomor 1115/DJU/OT1.6/IV/2024 tanggal 17 April 2024 Hal Pengisian Survei Mandiri dan Penilaian Evaluasi Mandiri Zona Integritas
26	Pengadilan Negeri Karawang	LKE Manual belum ada catatan/penjelasan/keterangan diberikannya nilai pada setiap sub komponen dan seluruh sub komponen diberi nilai sempurna sehingga nilai total 100
27	Pengadilan Negeri Kasongan	• LKE Manual belum ada catatan/penjelasan/keterangan diberikannya nilai pada setiap sub komponen dan tidak ada tautan data dukung; • Tidak ada Laporan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) sehingga belum sesuai dengan kebijakan Dirjen Badilum berdasarkan surat Nomor 1115/DJU/OT1.6/IV/2024 tanggal 17 April 2024 Hal Pengisian Survei Mandiri dan Penilaian Evaluasi Mandiri Zona Integritas.

No	Nama Unit Kerja	Catatan Evaluator
28	Pengadilan Negeri Kayuagung	• LKE PMPZI dan tidak ada tautan data dukung • Periode survei (SPAK dan SPKP) Triwulan I Tahun 2024 dan laporan survei diterbitkan Maret 2024 sehingga tidak sesuai dengan kebijakan Dirjen Badilum berdasarkan surat Nomor 1115/DJU/OT1.6/IV/2024 tanggal 17 April 2024 Hal Pengisian Survei Mandiri dan Penilaian Evaluasi Mandiri Zona Integritas
29	Pengadilan Negeri Kisaran	Periode survei (SPAK dan SPKP) Triwulan I Tahun 2024 dan laporan survei diterbitkan Maret 2024 sehingga tidak sesuai dengan kebijakan Dirjen Badilum berdasarkan surat Nomor 1115/DJU/OT1.6/IV/2024 tanggal 17 April 2024 Hal Pengisian Surveiy Mandiri dan Penilaian Evaluasi Mandiri Zona Integritas
30	Pengadilan Negeri Koba	LKE Manual belum ada catatan/penjelasan/keterangan diberikannya nilai pada setiap sub komponen
31	Pengadilan Negeri Kota Agung	• LKE belum menggunakan format LKE Manual tetapi menggunakan LKE dari aplikasi pmpzi.mahkamahagung.go.id. • Periode survei (SPAK dan SPKP) Triwulan I Tahun 2024 dan laporan survei diterbitkan Maret 2024 sehingga tidak sesuai dengan kebijakan Dirjen Badilum

No	Nama Unit Kerja	Catatan Evaluator
		berdasarkan surat Nomor 1115/DJU/OT1.6/IV/2024 tanggal 17 April 2024 Hal Pengisian Survei Mandiri dan Penilaian Evaluasi Mandiri Zona Integritas
32	Pengadilan Negeri Kotabumi	• LKE belum menggunakan format LKE Manual tetapi menggunakan LKE dari aplikasi pmpzi.mahkamahagung.go.id. • Tidak ada laporan SPKP dan SPAK
33	Pengadilan Negeri Kotamobagu	LKE Manual belum ada catatan/penjelasan/keterangan diberikannya nilai pada setiap sub komponen
34	Pengadilan Negeri Kuala Kapuas	• LKE menggunakan LKE dari aplikasi pmpzi.mahkamahagung.go.id dan tidak ada penjelasan alasan pemberian nilai pada setiap sub komponen; • Tidak ada Laporan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) sehingga tidak sesuai dengan kebijakan Dirjen Badilum berdasarkan surat Nomor 1115/DJU/OT1.6/IV/2024 tanggal 17 April 2024 Hal Pengisian Survei Mandiri dan Penilaian Evaluasi Mandiri Zona Integritas.
35	Pengadilan Negeri Kuala Kurun	• LKE menggunakan LKE dari aplikasi pmpzi.mahkamahagung.go.id dan tidak ada penjelasan alasan pemberian nilai pada setiap sub komponen;

No	Nama Unit Kerja	Catatan Evaluator
		• Periode survei (SPAK dan SPKP) Triwulan I Tahun 2024
36	Pengadilan Negeri Kuningan	• LKE PMPZI tanpa ada penjelasan alasan pemberian nilai pada setiap sub komponen; • Tidak ada Laporan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) sehingga tidak sesuai dengan kebijakan Dirjen Badilum berdasarkan surat Nomor 1115/DJU/OT1.6/IV/2024 tanggal 17 April 2024 Hal Pengisian Survei Mandiri dan Penilaian Evaluasi Mandiri Zona Integritas.
37	Pengadilan Negeri Labuha	LKE Manual belum ada catatan/penjelasan/keterangan diberikannya nilai pada setiap sub komponen
38	Pengadilan Negeri Lahat	LKE Manual belum ada catatan/penjelasan/keterangan diberikannya nilai pada setiap sub komponen dan tidak ada tautan data dukung
39	Pengadilan Negeri Lembata	• LKE Manual belum ada catatan/penjelasan/keterangan diberikannya nilai pada setiap sub komponen dan tidak ada tautan data dukung • Tidak ada Laporan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) sehingga tidak sesuai dengan kebijakan Dirjen Badilum berdasarkan surat Nomor 1115/DJU/OT1.6/IV/2024 tanggal 17 April 2024 Hal Pengisian

No	Nama Unit Kerja	Catatan Evaluator
		Survei Mandiri dan Penilaian Evaluasi Mandiri Zona Integritas
40	Pengadilan Negeri Lhoksukon	LKE Manual belum ada catatan/penjelasan/keterangan diberikannya nilai pada setiap sub komponen dan tidak ada tautan data dukung
41	Pengadilan Negeri Liwa	• LKE Manual belum ada catatan/penjelasan/keterangan diberikannya nilai pada setiap sub komponen; • Tidak ada Laporan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) sehingga tidak sesuai dengan kebijakan Dirjen Badilum berdasarkan surat Nomor 1115/DJU/OT1.6/IV/2024 tanggal 17 April 2024 Hal Pengisian Survei Mandiri dan Penilaian Evaluasi Mandiri Zona Integritas
42	Pengadilan Negeri Magetan	LKE Manual belum ada catatan/penjelasan/keterangan diberikannya nilai pada setiap sub komponen
43	Pengadilan Negeri Majalengka	LKE Manual, namun tidak ada catatan/penjelasan/keterangan diberikan nilai pada sub setiap sub komponen.
44	Pengadilan Negeri Marabahan	Tidak ada laporan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan, namun terdapat Laporan Survei Kepuasan Masyarakat
45	Pengadilan Negeri Marisa	• LKE PMPZI tanpa ada penjelasan alasan pemberian nilai pada setiap sub komponen;

No	Nama Unit Kerja	Catatan Evaluator
		• Laporan Survei (SPAK dan SPKP) disahkan April 2024 sehingga tidak sesuai dengan kebijakan Dirjen Badilum berdasarkan surat Nomor 1115/DJU/OT1.6/IV/2024 tanggal 17 April 2024 Hal Pengisian Survei Mandiri dan Penilaian Evaluasi Mandiri Zona Integritas
46	Pengadilan Negeri Masohi	• LKE Manual, namun tidak ada catatan/penjelasan/keterangan diberikan nilai pada sub setiap sub komponen; • Survei dilaksanakan tidak sesuai dengan kebijakan Dirjen Badilum berdasarkan surat nomor 1115/DJU/OT1.6/IV/2024 tanggal 17 April 2024 Hal Pengisian Survei Mandiri dan Penilaian Evaluasi Mandiri Zona Integritas. Periode Survei Triwulan I Tahun 2024 dan tidak ada Laporan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP).
47	Pengadilan Negeri Mataram	LKE Manual, namun tidak ada catatan/penjelasan/keterangan diberikan nilai pada sub setiap sub komponen.
48	Pengadilan Negeri Mempawah	LKE Manual, namun tidak ada catatan/penjelasan/keterangan diberikan nilai pada setiap sub komponen.
49	Pengadilan Negeri Menggala	• LKE Manual, namun tidak ada catatan/penjelasan/keterangan diberikan nilai pada setiap sub komponen.

No	Nama Unit Kerja	Catatan Evaluator
		• Survei dilaksanakan tidak sesuai dengan kebijakan Dirjen Badilum berdasarkan surat nomor 1115/DJU/OT1.6/IV/2024 tanggal 17 April 2024 Hal Pengisian Survei Mandiri dan Penilaian Evaluasi Mandiri Zona Integritas. Periode Survei Triwulan I Tahun 2024 dan tidak ada Laporan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP).
50	Pengadilan Negeri Mentok	LKE Manual namun belum terdapat catatan atau penjelasan keterangan pada setiap sub area.
51	Pengadilan Negeri Metro	• LKE Manual, namun pada Area Pengungkit (Reform) dan Area Hasil tidak ada catatan/penjelasan/keterangan diberikan nilai pada sub setiap sub area tersebut • Survei dilaksanakan tidak sesuai dengan kebijakan Dirjen Badilum berdasarkan surat nomor 1115/DJU/OT1.6/IV/2024 tanggal 17 April 2024 Hal Pengisian Survei Mandiri dan Penilaian Evaluasi Mandiri Zona Integritas. Periode Survei Triwulan I Tahun 2024 dan tidak ada Laporan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP).
52	Pengadilan Negeri Nanga Bulik	• LKE Manual belum ada catatan/ penjelasan/keterangan diberikannya nilai pada setiap sub komponen;

No	Nama Unit Kerja	Catatan Evaluator
		• SPKP dan SPAK hanya berupa tampilan website dan ringkasan laporan yang tidak lengkap • Survei tidak sesuai format kebijakan Dirjen Badilum berdasarkan surat nomor 1115/DJU/OT1.6/IV/2024 tanggal 17 April 2024 Hal Pengisian Survei Mandiri dan Penilaian Evaluasi Mandiri Zona Integritas (hanya dokumen tampilan nilai di website)
53	Pengadilan Negeri Padang Panjang	LKE Manual belum ada catatan/penjelasan/keterangan diberikannya nilai pada setiap sub komponen
54	Pengadilan Negeri Palangkaraya	LKE belum menggunakan format LKE Manual tetapi menggunakan LKE dari aplikasi pmpzi.mahkamahagung.go.id dan tidak ada penjelasan alasan pemberian nilai pada setiap sub komponen
55	Pengadilan Negeri Pangkalan Balai	LKE belum menggunakan format LKE Manual tetapi menggunakan LKE dari aplikasi pmpzi.mahkamahagung.go.id dan tidak ada penjelasan alasan pemberian nilai pada setiap sub komponen
56	Pengadilan Negeri Paringin	LKE Manual, namun tidak ada catatan/penjelasan/keterangan diberikan nilai pada setiap sub komponen.
57	Pengadilan Negeri Pasarwajo	LKE Manual belum ada catatan/ penjelasan/keterangan diberikannya nilai pada setiap sub komponen

No	Nama Unit Kerja	Catatan Evaluator
58	Pengadilan Negeri Pematang Siantar	• LKE Manual belum ada catatan/ penjelasan/keterangan diberikannya nilai pada setiap sub komponen • TLHP belum 100%
59	Pengadilan Negeri Penajam	LKE belum menggunakan format LKE Manual tetapi menggunakan LKE dari aplikasi pmpzi.mahkamahagung.go.id dan tidak ada penjelasan alasan pemberian nilai pada setiap sub komponen.
60	Pengadilan Negeri Poso	Survei dilaksanakan tidak sesuai dengan kebijakan Dirjen Badilum berdasarkan surat nomor 1115/DJU/OT1.6/IV/2024 tanggal 17 April 2024 Hal Pengisian Survei Mandiri dan Penilaian Evaluasi Mandiri Zona Integritas
61	Pengadilan Negeri Prabumulih	LKE Manual belum ada catatan/ penjelasan/keterangan diberikannya nilai pada setiap sub komponen
62	Pengadilan Negeri Pulang Pisau	LKE Manual namun belum terdapat link eviden dan catatan/penjelasan keterangan pada setiap sub area
63	Pengadilan Negeri Purwokerto	• LKE Manual tidak sesuai format dan belum ada catatan/ penjelasan/keterangan diberikannya nilai pada setiap sub komponen; • Survei dilaksanakan tidak sesuai dengan kebijakan Dirjen Badilum berdasarkan surat nomor 1115/DJU/OT1.6/IV/2024 tanggal 17 April 2024 Hal Pengisian Survei Mandiri dan Penilaian Evaluasi Mandiri Zona Integritas.

No	Nama Unit Kerja	Catatan Evaluator
		SPKP dilaksanakan Triwulan II Tahun 2024 namun SPAK dilaksanakan Triwulan I Tahun 2024 dengan dasar survei yang tidak sesuai ketentuan. • TLHP belum 100%
64	Pengadilan Negeri Ranai / Pengadilan Negeri Natuna	LKE Manual belum ada catatan/penjelasan/keterangan diberikannya nilai pada setiap sub komponen
65	Pengadilan Negeri Rantau	• LKE tidak sesuai format • Tidak ada laporan hasil survei
66	Pengadilan Negeri Rengat	Tidak ada laporan hasil Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan pekan survei tidak sesuai kebijakan Dirjen Badilum berdasarkan surat nomor 1115/DJU/OT1.6/IV/2024 tanggal 17 April 2024 Hal Pengisian Survei Mandiri dan Penilaian Evaluasi Mandiri Zona Integritas
67	Pengadilan Negeri Sekayu	LKE belum menggunakan format LKE Manual tetapi menggunakan LKE dari aplikasi pmpzi.mahkamahagung.go.id dan tidak ada penjelasan alasan pemberian nilai pada setiap sub komponen
68	Pengadilan Negeri Semarapura	LKE Manual belum ada catatan/penjelasan/keterangan diberikannya nilai pada setiap sub komponen dan tidak didukung dengan link eviden;
69	Pengadilan Negeri Sengkang	LKE Manual belum ada catatan/ penjelasan/keterangan diberikannya nilai pada setiap sub komponen
70	Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura	LKE Manual belum ada catatan/ penjelasan/keterangan yang

No	Nama Unit Kerja	Catatan Evaluator
		diberikannya nilai pada setiap sub komponen serta belum didukung link eviden pada Area Reform dan Area Hasil
71	Pengadilan Negeri Sibolga	• Pelaksanaan Survei Tahun 2023 • LKE Manual namun belum terdapat catatan/penjelasan pada setiap sub komponen
72	Pengadilan Negeri Simalungun	LKE Manual belum ada catatan/ penjelasan/keterangan yang diberikannya nilai pada setiap sub komponen
73	Pengadilan Negeri Singaraja	LKE belum menggunakan format LKE Manual tetapi menggunakan LKE dari aplikasi pmpzi.mahkamahagung.go.id.
74	Pengadilan Negeri Sleman	Laporan SPKP tidak sesuai format (Laporan SKM)
75	Pengadilan Negeri Tahuna	TLHP belum 100%
76	Pengadilan Negeri Tamiang Layang	LKE Manual belum ada catatan/penjelasan/keterangan diberikannya nilai pada setiap sub komponen dan tidak ada tautan data dukung
77	Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun	• LKE menggunakan LKE dari PMPZI • SPAK dan SPKP hanya berupa publikasi atas hasil survei
78	Pengadilan Negeri Tanjung Pinang	• LKE tidak sesuai format • Laporan SPKP tidak sesuai format (Laporan SKM)
79	Pengadilan Negeri Tanjungkarang	• LKE Manual belum ada catatan/ penjelasan/keterangan dan link eviden diberikannya nilai pada setiap sub komponen • Tidak ada laporan hasil survei SPKP

No	Nama Unit Kerja	Catatan Evaluator
80	Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	LKE Manual belum ada catatan/penjelasan/keterangan diberikannya nilai pada setiap sub komponen (tidak sesuai format)
81	Pengadilan Negeri Ternate	• LKE Manual belum ada catatan/ penjelasan/keterangan diberikannya nilai pada komponen Hasil • TLHP belum 100%
82	Pengadilan Negeri Tilamuta	Laporan SPKP tidak sesuai format (Laporan SKM)
83	Pengadilan Negeri Tobelo	• LKE Manual belum ada catatan/ penjelasan/keterangan diberikannya nilai pada setiap sub komponen • Pekan survei tidak sesuai kebijakan Dirjen Badilum berdasarkan surat nomor 1115/DJU/OT1.6/IV/2024 tanggal 17 April 2024 Hal Pengisian Survei Mandiri dan Penilaian Evaluasi Mandiri Zona Integritas • TLHP belum 100%
84	Pengadilan Negeri Tondano	LKE Manual belum ada catatan/ penjelasan/keterangan diberikannya nilai pada setiap sub komponen
85	Pengadilan Negeri Waikabubak	• LKE belum menggunakan format LKE Manual tetapi menggunakan LKE dari aplikasi pmpzi.mahkamahagung.go.id dan tidak ada penjelasan alasan pemberian nilai pada setiap sub komponen • Survei dilaksanakan tidak sesuai dengan kebijakan Dirjen Badilum berdasarkan surat nomor

No	Nama Unit Kerja	Catatan Evaluator
		1115/DJU/OT1.6/IV/2024 tanggal 17 April 2024 Hal Pengisian Survei Mandiri dan Penilaian Evaluasi Mandiri Zona Integritas.
86	Pengadilan Negeri Wonosobo	• LKE Manual belum ada catatan/ penjelasan/keterangan diberikannya nilai pada setiap sub komponen • TLHP belum 100%

2.a. Peradilan Agama - Tingkat Banding

No	Nama Unit Kerja	Catatan Evaluator
1	Pengadilan Tinggi Agama Kupang	Laporan Survei berupa Laporan Survei Kepuasan Masyarakat dan Survei Persepsi Anti Korupsi, sehingga tidak ada Laporan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)

2.b. Peradilan Agama - Tingkat Pertama

No	Nama Unit Kerja	Catatan Evaluator
1	Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon	Periode survei (SPAK dan SPKP) Triwulan I Tahun 2024
2	Mahkamah Syar'iyah Sigli	LKE Manual belum ada catatan/ penjelasan/keterangan diberikannya nilai pada setiap sub komponen
3	Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan	• Laporan survei tidak sesuai edaran Dirjen Badilag Nomor 809/DJA.1/OT1/IV/2024 tentang Pengusulan Satuan Kerja Zona Integritas Di Lingkungan Peradilan Agama Tahun 2024.

No	Nama Unit Kerja	Catatan Evaluator
		• TLHP belum 100%
4	Pengadilan Agama Banggai	LKE tidak sesuai format
5	Pengadilan Agama Banjarnegara	Tidak ada Laporan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) sehingga laporan survei tidak sesuai edaran Dirjen Badilag Nomor 809/DJA.1/OT1/IV/2024 tentang Pengusulan Satuan Kerja Zona Integritas Di Lingkungan Peradilan Agama Tahun 2024.
6	Pengadilan Agama Bantaeng	Periode survei (SPAK dan SPKP) Triwulan I Tahun 2024
7	Pengadilan Agama Barru	• LKE belum diberikan nilai dan catatan/ penjelasan/ keterangan pada setiap sub komponen • Periode survei (SPAK dan SPKP) Triwulan I Tahun 2024, tidak sesuai edaran Dirjen Badilag Nomor 809/DJA.1/OT1/IV/2024 tentang Pengusulan Satuan Kerja Zona Integritas Di Lingkungan Peradilan Agama Tahun 2024.
8	Pengadilan Agama Bengkalis	• LKE belum menggunakan format LKE Manual tetapi menggunakan LKE dari aplikasi pmpzi.mahkamahagung.go.id • Laporan survei tidak sesuai edaran Dirjen Badilag Nomor 809/DJA.1/OT1/IV/2024 tentang Pengusulan Satuan Kerja Zona Integritas Di Lingkungan Peradilan Agama Tahun 2024.
9	Pengadilan Agama Kangean	Tidak ada Laporan Hasil Survei (SPAK dan SPKP) sesuai format namun hanya informasi hasil survei

No	Nama Unit Kerja	Catatan Evaluator
10	Pengadilan Agama Kisaran	Tidak ada dokumen Laporan SPAK dan SPKP, hanya ada Laporan SKM sehingga tidak sesuai format SE Menpan No 4 Tahun 2023 dan e-survey Dirjen Badilag
11	Pengadilan Agama Klaten	Periode survei (SPAK dan SPKP) Triwulan I Tahun 2024 (Survei diterbitkan tanggal 5 April 2024)
12	Pengadilan Agama Majene	LKE belum menggunakan format LKE Manual tetapi menggunakan LKE dari aplikasi pmpzi.mahkamahagung.go.id.
13	Pengadilan Agama Malili	Survey Triwulan I, namun di luar pekan survei sebagaimana surat edaran dari Dirjen Badilag (laporan tertanggal 28 Maret 2024)
14	Pengadilan Agama Manokwari	Tidak terdapat Laporan Survei IPAK.
15	Pengadilan Agama Masohi	Pelaksanaan Survei IPAK tidak sesuai dengan pekan survei dari Badilag, pada survei IPKP tidak terdapat tanggal pelaksanaan survei. Namun keseluruhan survei sudah melampirkan hasil survei Triwulan II.
16	Pengadilan Agama Muara Enim	Periode survei (IPKP dan IPAK) pada Triwulan I 2024 (Januari s.d. Maret), tidak sesuai edaran Dirjen Badilag Nomor 809/DJA.1/OT1/IV/2024 tentang Pengusulan Satuan Kerja Zona Integritas Di Lingkungan Peradilan Agama Tahun 2024.
17	Pengadilan Agama Natuna	Periode survei 2023 dan hanya memuat Indeks Persepsi Korupsi (IPK)
18	Pengadilan Agama Negara	Tidak ada Laporan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP), dan periode laporan survei (IKM dan IPAK)

No	Nama Unit Kerja	Catatan Evaluator
		pada Triwulan I 2024 (Januari s.d. Maret) yang disahkan 28 Maret 2024, sehingga tidak sesuai edaran Dirjen Badilag Nomor 809/DJA.1/OT1/IV/2024 tentang Pengusulan Satuan Kerja Zona Integritas Di Lingkungan Peradilan Agama Tahun 2024.
19	Pengadilan Agama Nganjuk	Tidak terdapat Laporan Survei (IPKP dan IPAK).
20	Pengadilan Agama Pangkajene	• LKE Manual namun tidak dilengkapi dengan catatan penjelasan dan tautan data dukung; • Laporan Survei Triwulan IV tahun 2023.
21	Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci	LKE belum menggunakan format LKE Manual tetapi menggunakan LKE dari aplikasi pmpzi.mahkamahagung.go.id .
22	Pengadilan Agama Pariaman	• LKE Manual namun catatan penjelasan diisi tautan data dukung • Tidak ada Laporan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP), dan periode laporan survei (IKM dan IPK) pada Triwulan I 2024 (Januari s.d. Maret) yang disahkan 29 Maret 2024, sehingga tidak sesuai edaran Dirjen Badilag Nomor 809/DJA.1/OT1/IV/2024 tentang Pengusulan Satuan Kerja Zona Integritas Di Lingkungan Peradilan Agama Tahun 2024.
23	Pengadilan Agama Pasarwajo	Tidak terdapat Laporan Survei IPAK.

No	Nama Unit Kerja	Catatan Evaluator
24	Pengadilan Agama Polewali	Catatan pada LKE tidak diisi
25	Pengadilan Agama Ponorogo	Link data dukung pada LKE tidak dapat diakses.
26	Pengadilan Agama Pontianak	LKE Manual namun seluruh catatan penjelasan pada setiap sub komponen diisi "dokumen/eviden tersedia" sehingga tidak dapat dilakukan evaluasi lebih lanjut
27	Pengadilan Agama Sanggau	LKE yang dilampirkan LKE PMPZI bukan LKE Manual
28	Pengadilan Agama Selong	Periode survei (IPKP dan IPAK) pada Triwulan I 2024 (Januari s.d. Maret), tidak sesuai edaran Dirjen Badilag Nomor 809/DJA.1/OT1/IV/2024 tentang Pengusulan Satuan Kerja Zona Integritas Di Lingkungan Peradilan Agama Tahun 2024.
29	Pengadilan Agama Simalungun	Periode survei (IPKP dan IPAK) pada Triwulan I 2024 (Januari s.d. Maret), tidak sesuai edaran Dirjen Badilag Nomor 809/DJA.1/OT1/IV/2024 tentang Pengusulan Satuan Kerja Zona Integritas Di Lingkungan Peradilan Agama Tahun 2024 karena surat pengantar tertanggal 28 Maret 2024 dan tidak ada informasi terkait jadwal pelaksanaan survei.
30	Pengadilan Agama Sinjai	LKE yang dilampirkan LKE PMPZI bukan LKE Manual
31	Pengadilan Agama Sintang	LKE belum menggunakan format LKE Manual tetapi menggunakan LKE dari aplikasi pmpzi.mahkamahagung.go.id.

No	Nama Unit Kerja	Catatan Evaluator
32	Pengadilan Agama Soasio	LKE Manual namun tidak dilengkapi dengan catatan penjelasan dan tautan data dukung
33	Pengadilan Agama Soe	Catatan pada LKE tidak diisi
34	Pengadilan Agama Stabat	Tidak ada Laporan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)
35	Pengadilan Agama Taliwang	Laporan Survei dokumen tidak ada dilampirkan.
36	Pengadilan Agama Tanah Grogot	Periode survei (IPKP dan IPAK) pada Triwulan I 2024 (Januari s.d. Maret), tidak sesuai edaran Dirjen Badilag Nomor 809/DJA.1/OT1/IV/2024 tentang Pengusulan Satuan Kerja Zona Integritas Di Lingkungan Peradilan Agama Tahun 2024.
37	Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun	• LKE Manual namun tidak dilengkapi dengan catatan penjelasan; • Tidak terdapat Laporan Survei.
38	Pengadilan Agama Tanjung Selor	LKE Manual namun seluruh Catatan/Keterangan/Penjelasan tidak terisi
39	Pengadilan Agama Tegal	Laporan Survei Triwulan IV tahun 2023
40	Pengadilan Agama Teluk Kuantan	Catatan pada LKE tidak diisi
41	Pengadilan Agama Watansoppeng	• LKE Manual belum ada catatan/ penjelasan/keterangan diberikannya nilai pada setiap sub komponen • TLHP belum 100%
42	Pengadilan Agama Wates	LKE belum menggunakan format LKE Manual tetapi menggunakan LKE dari aplikasi pmpzi.mahkamahagung.go.id .

3. Peradilan Militer - Tingkat Pertama

No	Nama Unit Kerja	Catatan Evaluator
1	Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh	Catatan pada LKE tidak diisi/kosong
2	Pengadilan Militer I-04 Palembang	• LKE belum menggunakan format LKE Manual tetapi menggunakan LKE dari aplikasi pmpzi.mahkamahagung.go.id • Tidak ada laporan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan, namun terdapat Laporan Survei Kepuasan Masyarakat
3	Pengadilan Militer I-07 Balikpapan	• LKE Manual namun tidak seluruh Catatan/Keterangan/Penjelasan terisi lengkap; • Periode survei (IPKP dan IPAK) pada Triwulan I 2024 (Januari s.d. Maret), tidak sesuai edaran Dirjen Badilmiltun Nomor 1115/DJU/OT1.6./IV/2024 tentang Pengisian Survei Mandiri dan Penilaian Evaluasi Mandiri Zona Integritas.

4.a. Peradilan Tata Usaha Negara - Tingkat Banding

No	Nama Unit Kerja	Catatan Evaluator
1	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya	• LKE Manual belum ada catatan/penjelasan/keterangan diberikannya nilai pada setiap sub komponen • Tidak ada laporan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan, namun terdapat Laporan Survei Kepuasan Masyarakat

4.b. Peradilan Tata Usaha Negara - Tingkat Pertama

No	Nama Unit Kerja	Catatan Evaluator
----	-----------------	-------------------

1	Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram	LKE Manual namun tidak disertai dengan catatan;
2	Pengadilan Tata Usaha Negara Palu	TLHP belum 100%
3	Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru	Periode survei (IPKP dan IPAK) pada Triwulan I 2024 (Januari s.d. Maret), tidak sesuai edaran Dirjen Badilmiltun Nomor 1115/DJU/OT1.6./IV/2024 tentang Pengisian Survei Mandiri dan Penilaian Evaluasi Mandiri Zona Integritas.
4	Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda	LKE Manual namun tidak disertai dengan catatan dan tautan data dukung tidak dapat diklik;
5	Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang	LKE Manual namun tidak disertai dengan catatan dan tautan

C. DAFTAR UNIT KERJA YANG DINYATAKAN TIDAK LULUS PENILAIAN (*DESK
EVALUATION*) – ANALISIS DOKUMEN LKE ZONA INTEGRITAS MENUJU
WBK

1. Lingkungan Peradilan Umum
1.a. Pengadilan Tingkat Banding

No	Nama Unit Kerja	Kriteria
1	Pengadilan Tinggi Maluku Utara	Kriteria 1 dan Kriteria 2
2	Pengadilan Tinggi Palembang	Kriteria 1 dan Kriteria 2

- 1.b. Pengadilan Tingkat Pertama

No	Nama Unit Kerja	Kriteria
1	Pengadilan Negeri Baubau	Kriteria 1
2	Pengadilan Negeri Bireuen	Kriteria 2
3	Pengadilan Negeri Boyolali	Kriteria 1 dan Kriteria 2
4	Pengadilan Negeri Kupang	Kriteria 2
5	Pengadilan Negeri Padang	Kriteria 1
6	Pengadilan Negeri Pekalongan	Kriteria 1 dan Kriteria 2

No	Nama Unit Kerja	Kriteria
7	Pengadilan Negeri Putussibau	Kriteria 2
8	Pengadilan Negeri Ambon	Kriteria 1 dan Kriteria 2
9	Pengadilan Negeri Blora	Kriteria 1 dan Kriteria 2
10	Pengadilan Negeri Bojonegoro	Kriteria 1 dan Kriteria 2
11	Pengadilan Negeri Bulukumba	Kriteria 1 dan Kriteria 2
12	Pengadilan Negeri Cianjur	Kriteria 1 dan Kriteria 2
13	Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu	Kriteria 1 dan Kriteria 2
14	Pengadilan Negeri Gedong Tataan	Kriteria 1 dan Kriteria 2
15	Pengadilan Negeri Kab. Madiun	Kriteria 1 dan Kriteria 2
16	Pengadilan Negeri Kandungan	Kriteria 1 dan Kriteria 2
17	Pengadilan Negeri Ketapang	Kriteria 1 dan Kriteria 2
18	Pengadilan Negeri Manado	Kriteria 1 dan Kriteria 2
19	Pengadilan Negeri Ngabang	Kriteria 1 dan Kriteria 2
20	Pengadilan Negeri Probolinggo	Kriteria 1 dan Kriteria 2
21	Pengadilan Negeri Sei Rampah	Kriteria 1 dan Kriteria 2
22	Pengadilan Negeri Stabat	Kriteria 1 dan Kriteria 2
23	Pengadilan Negeri Tarakan	Kriteria 1 dan Kriteria 2
24	Pengadilan Negeri Wonogiri	Kriteria 1 dan Kriteria 2

2. Lingkungan Peradilan Agama

2.a. Pengadilan Tingkat Banding

No	Nama Unit Kerja	Kriteria
1	Pengadilan Tinggi Agama Manado	Kriteria 1 dan Kriteria 2

2.b. Pengadilan Tingkat Pertama

No	Nama Unit Kerja	Kriteria
1	Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh	Kriteria 1
2	Mahkamah Syar'iyah Jantho	Kriteria 1 dan Kriteria 2
3	Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe	Kriteria 1 dan Kriteria 2
4	Pengadilan Agama Ampana	Kriteria 1 dan Kriteria 2
5	Pengadilan Agama Bajawa	Kriteria 1 dan Kriteria 2
6	Pengadilan Agama Balikpapan	Kriteria 1 dan Kriteria 2
7	Pengadilan Agama Bangkalan	Kriteria 1 dan Kriteria 2

No	Nama Unit Kerja	Kriteria
8	Pengadilan Agama Bangkinang	Kriteria 1 dan Kriteria 2
9	Pengadilan Agama Baubau	Kriteria 1 dan Kriteria 2
10	Pengadilan Agama Bawean	Kriteria 1 dan Kriteria 2
11	Pengadilan Agama Gedong Tataan	Kriteria 1 dan Kriteria 2
12	Pengadilan Agama Koto Baru	Kriteria 1 dan Kriteria 2
13	Pengadilan Agama Kuala Kapuas	Kriteria 1 dan Kriteria 2
14	Pengadilan Agama Kuala Pembuang	Kriteria 1 dan Kriteria 2
15	Pengadilan Agama Kudus	Kriteria 1
16	Pengadilan Agama Kupang	Kriteria 1 dan Kriteria 2
17	Pengadilan Agama Manado	Kriteria 1 dan Kriteria 2
18	Pengadilan Agama Manna	Kriteria 1 dan Kriteria 2
19	Pengadilan Agama Masamba	Kriteria 1 dan Kriteria 2
20	Pengadilan Agama Merauke	Kriteria 1 dan Kriteria 2
21	Pengadilan Agama Muara Tebo	Kriteria 1 dan Kriteria 2
22	Pengadilan Agama Nabire	Kriteria 1 dan Kriteria 2
23	Pengadilan Agama Palangkaraya	Kriteria 1 dan Kriteria 2
24	Pengadilan Agama Palopo	Kriteria 1 dan Kriteria 2
25	Pengadilan Agama Pangkalan Balai	Kriteria 1 dan Kriteria 2
26	Pengadilan Agama Rangkasbitung	Kriteria 1 dan Kriteria 2
27	Pengadilan Agama Rengat	Kriteria 1 dan Kriteria 2
28	Pengadilan Agama Rumbia	Kriteria 1 dan Kriteria 2
29	Pengadilan Agama Sengeti	Kriteria 1 dan Kriteria 2
30	Pengadilan Agama Singkawang	Kriteria 1 dan Kriteria 2
31	Pengadilan Agama Sorong	Kriteria 1 dan Kriteria 2
32	Pengadilan Agama Sungailiat	Kriteria 1 dan Kriteria 2
33	Pengadilan Agama Suwawa	Kriteria 1 dan Kriteria 2
34	Pengadilan Agama Tanjung Pandan	Kriteria 1 dan Kriteria 2
35	Pengadilan Agama Tanjung Pati	Kriteria 1 dan Kriteria 2
36	Pengadilan Agama Tembilahan	Kriteria 1 dan Kriteria 2
37	Pengadilan Agama Ternate	Kriteria 1 dan Kriteria 2
38	Pengadilan Agama Tondano	Kriteria 1 dan Kriteria 2
39	Pengadilan Agama Tuban	Kriteria 1 dan Kriteria 2
40	Pengadilan Agama Tulungagung	Kriteria 1 dan Kriteria 2
41	Pengadilan Agama Wonogiri	Kriteria 1 dan Kriteria 2

3. Lingkungan Peradilan Militer

No	Nama Unit Kerja	Kriteria
1	Pengadilan Militer I-03 Padang	Kriteria 1 dan Kriteria 2

4. Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

4.a. Pengadilan Tingkat Banding

No	Nama Unit Kerja	Kriteria
1	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar	Kriteria 1 dan Kriteria 2

4.b. Pengadilan Tingkat Pertama

No	Nama Unit Kerja	Kriteria
1	Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo	Kriteria 1 dan Kriteria 2
2	Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi	Kriteria 1 dan Kriteria 2
3	Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang	Kriteria 1 dan Kriteria 2
4	Pengadilan Tata Usaha Negara Padang	Kriteria 1 dan Kriteria 2
5	Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya	Kriteria 1 dan Kriteria 2

Keterangan Kriteria Penilaian

No	Kriteria	Keterangan Kriteria	Rincian
1	Kriteria 1	Catatan/Penjelasan LKE	Catatan/Penjelasan pada LKE tidak sesuai/tidak lengkap dan/atau tidak relevan dengan data dukung yang dilampirkan sehingga mempengaruhi nilai akhir dan tidak memenuhi syarat penetapan unit kerja berpredikat menuju WBK

No	Kriteria	Keterangan Kriteria	Rincian
2	Kriteria 2	Lampiran Data Dukung	Tautan/ <i>link</i> Data Dukung tidak dapat diakses/tidak lengkap/tidak valid dan/atau tidak relevan dengan penjelasan yang diuraikan pada LKE sehingga mempengaruhi nilai akhir dan tidak memenuhi syarat penetapan unit kerja berpredikat menuju WBK

D. DAFTAR UNIT KERJA YANG DINYATAKAN TIDAK LULUS PENILAIAN (*DESK EVALUATION*) – WAWANCARA DAN VERIFIKASI LAPANGAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK

1. Unit Eselon 1

No	Nama Unit Kerja	Catatan Evaluator
1	Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan	• Terdapat komitmen Pimpinan dan seluruh aparatur yang tergambar pada hasil <i>desk evaluation</i> – wawancara dan verifikasi lapangan; • Kinerja tahun 2023 telah tercapai; • Peningkatan Kualitas Layanan telah diupayakan melalui sejumlah inovasi layanan yang baru dimulai di tahun 2024 dan belum optimal. • Terdapat peristiwa yang berdampak pada penurunan integritas aparatur yang dibuktikan dengan adanya penjatuhan Hukuman Disiplin (HD): Tahun 2023: HD Berat (1); HD Ringan (1) Tahun 2024 : HD Ringan (1)

2. Lingkungan Peradilan Umum
2.a. Pengadilan Tingkat Banding

No	Nama Unit Kerja	Catatan Evaluator
1	Pengadilan Tinggi Banda Aceh	• Terdapat komitmen Pimpinan dan seluruh aparaturnya yang tergambar pada hasil <i>desk evaluation</i> – wawancara dan verifikasi lapangan; • Kinerja tahun 2023 telah tercapai; • Kualitas pelayanan secara umum baik, namun terhadap penanganan pengaduan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku; • Inovasi yang diimplementasikan belum dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.
2	Pengadilan Tinggi Banten	• Terdapat komitmen Pimpinan dan seluruh aparaturnya yang tergambar pada hasil <i>desk evaluation</i> – wawancara dan verifikasi lapangan; • Kinerja tahun 2023 telah tercapai; • Inovasi tahun 2023 tidak berjalan. Inovasi yang menjadi unggulan "SiPerad" dihasilkan tahun 2024 masih dalam pengembangan dan sampai saat ini masih dalam proses penyelesaian, baru digunakan oleh 1 pengguna; • Inovasi Siperi dilaunching September 2024, sudah digunakan oleh 16 pengguna • Aplikasi Wasbidda merupakan inovasi masih dalam pengembangan belum dapat digunakan.

2.b. Pengadilan Tingkat Pertama

No	Nama Unit Kerja	Catatan Evaluator
1	Pengadilan Negeri Banjarbaru	• Terdapat komitmen Pimpinan dan seluruh aparatur yang tergambar pada hasil <i>desk evaluation</i> - wawancara, namun tidak tergambar saat verifikasi lapangan; • Data capaian kinerja tidak memadai Sasaran Strategis 1 dinyatakan dalam LKjIP tidak tercapai 100%; • Terdapat aktivitas di lingkungan kantor Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berpotensi mengganggu integritas hakim dan aparatur.
2	Pengadilan Negeri Bengkalis	• Komitmen Pimpinan dan seluruh aparatur tergambar pada hasil <i>desk evaluation</i> - wawancara dan verifikasi lapangan; • Kinerja tahun 2023 telah tercapai; • Peningkatan Kualitas Layanan telah diupayakan melalui sejumlah inovasi layanan dan telah diimplementasikan; • Pengendalian internal yang belum efektif diterapkan di lingkungan kantor Pengadilan Negeri Bengkalis yang berpotensi mengganggu integritas hakim dan aparatur.
3	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	• Komitmen Pimpinan dan seluruh aparatur tergambar pada hasil <i>desk evaluation</i> - wawancara dan verifikasi lapangan; • Informasi Capaian Kinerja pada LKjIP tidak memadai. Hal tersebut menggambarkan capaian kinerja belum menjadi perhatian utama

		dalam pembangunan Zona Integritas. • Peningkatan Kualitas Layanan telah diupayakan melalui sejumlah inovasi layanan dan telah diimplementasikan; • Pengendalian internal yang belum efektif diterapkan di lingkungan kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berpotensi mengganggu integritas hakim dan aparatur. • Terdapat peristiwa yang berdampak pada penurunan integritas hakim dan aparatur yang dibuktikan dengan adanya Pemberian Hukuman Disiplin (HD): Tahun 2023 : HD Ringan (3); HD Sedang (4); HD Berat (1) Tahun 2024 : HD Sedang (1)
--	--	--

3. Lingkungan Peradilan Agama
3.a. Pengadilan Tingkat Banding

No	Nama Unit Kerja	Catatan Evaluator
1	Pengadilan Tinggi Agama Bandung	• Komitmen Pimpinan dan seluruh aparatur tergambar pada hasil <i>desk evaluation</i> – wawancara dan verifikasi lapangan; • Kinerja tahun 2023 telah tercapai; • Peningkatan Kualitas Layanan telah diupayakan melalui sejumlah inovasi layanan dan telah diimplementasikan; • Dalam periode pembangunan zona integritas terindikasi adanya praktik pungutan tidak sesuai ketentuan.

3.b. Pengadilan Tingkat Pertama

No	Nama Unit Kerja	Catatan Evaluator
1	Pengadilan Agama Ambarawa	• Komitmen Pimpinan dan seluruh aparatur tergambar pada hasil <i>desk evaluation</i> – wawancara dan verifikasi lapangan; • Kinerja tahun 2023 telah tercapai; • Peningkatan Kualitas Layanan telah diupayakan melalui sejumlah inovasi layanan dan telah diimplementasikan; • Tidak terdapat peristiwa yang berdampak pada penurunan integritas hakim dan aparatur. Pada DE-Wawancara ditemukan Keluhan pada <i>Google Review</i> yang belum direspons terkait keluhan layanan yang kemudian ditindaklanjuti oleh Satuan Kerja. Pada periode pembangunan zona integritas terdapat beberapa laporan pengaduan layanan kepada Badan Pengawasan yakni tahun 2024 sebanyak 7 (tujuh) pengaduan. Atas seluruh pengaduan tersebut telah ditindaklanjuti melalui klarifikasi.
2	Pengadilan Agama Garut	• Komitmen Pimpinan dan seluruh aparatur tergambar pada hasil <i>desk evaluation</i> – wawancara dan verifikasi lapangan; • Kinerja tahun 2023 telah tercapai; • Peningkatan kualitas layanan telah diupayakan melalui sejumlah inovasi layanan, namun saat dilakukan pengujian terdapat kondisi inovasi antrian sidang hanya menggunakan 1 (satu) bahasa yakni

No	Nama Unit Kerja	Catatan Evaluator
		Bahasa Indonesia (tidak sesuai dengan informasi inovasi tersebut). Inovasi antrian tersebut menggunakan manual book unit kerja lain sehingga tidak dapat diyakini orisinalitasnya; • Terdapat peristiwa yang berdampak pada penurunan integritas hakim dan/atau aparatur.
3	Pengadilan Agama Jayapura	• Komitmen Pimpinan dan seluruh aparatur tergambar pada hasil <i>desk evaluation</i> – wawancara dan verifikasi lapangan; • Kinerja tahun 2023 telah tercapai; • Peningkatan kualitas layanan belum memadai yakni terkait layanan PTSP dan Posbakum; • Tidak terdapat peristiwa yang berdampak pada penurunan integritas hakim dan aparatur.
4	Pengadilan Agama Padang	• Komitmen Pimpinan dan seluruh aparatur tergambar pada hasil <i>desk evaluation</i> – wawancara dan verifikasi lapangan; • Kinerja tahun 2023 telah tercapai; • Peningkatan Kualitas Layanan telah diupayakan melalui sejumlah inovasi layanan dan telah diimplementasikan; • Terdapat peristiwa yang berdampak pada penurunan integritas hakim dan aparatur, yakni terdapat Hukuman Disiplin Ringan Tahun 2023 untuk 3 orang Hakim

No	Nama Unit Kerja	Catatan Evaluator
5	Pengadilan Agama Palu	• Komitmen Pimpinan dan seluruh aparaturnya tergambar pada hasil <i>desk evaluation</i> – wawancara dan verifikasi lapangan; • Pengukuran Kinerja tidak memadai; • Peningkatan Kualitas Layanan telah diupayakan melalui sejumlah inovasi layanan dan telah diimplementasikan; • Tidak terdapat peristiwa yang berdampak pada penurunan integritas hakim dan aparaturnya.
6	Pengadilan Agama Prabumulih	• Komitmen Pimpinan dan seluruh aparaturnya tergambar pada hasil <i>desk evaluation</i> – wawancara dan verifikasi lapangan; • Kinerja tahun 2023 telah tercapai; • Kualitas Layanan belum memadai, hasil survei belum ditindaklanjuti serta sarana dan prasarana tidak dilakukan pemeliharaan secara memadai; • Tidak terdapat peristiwa yang berdampak pada penurunan integritas hakim dan aparaturnya.

E. DAFTAR UNIT KERJA YANG DINYATAKAN TIDAK LULUS *CLEARANCE* PENILAIAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK

1. Lingkungan Peradilan Agama

No	Nama Unit Kerja	Hasil <i>Clearance</i>
1	Pengadilan Agama Bukittinggi	Tidak Lulus <i>Clearance</i> ORI

2. Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

No	Nama Unit Kerja	Hasil Clearance
1	Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung	Tidak Lulus Clearance KPK
2	Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung	Tidak Lulus Clearance KPK

F. DAFTAR UNIT KERJA YANG DINYATAKAN LULUS PENILAIAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK

1. Lingkungan Peradilan Umum
Pengadilan Tingkat Pertama

No	Nama Unit Kerja	Nilai	Catatan Evaluator	Rekomendasi
1	Pengadilan Negeri Pati	Pengungkit: 46,13 Hasil: 36,93 IPAK: 3,99 IPKP: 3,88 Nilai Total: 83,06	• Komitmen Pimpinan dan seluruh aparatur tergambar pada hasil desk evaluation – wawancara dan verifikasi lapangan; • Kinerja tahun 2023 telah tercapai; • Peningkatan Kualitas Layanan telah diupayakan melalui sejumlah inovasi layanan dan	• Mengoptimalkan internalisasi atas pembangunan ZI yang sudah dilakukan dan meningkatkan pengembangan manajemen risiko yang lebih dapat menghilangkan kemungkinan terjadinya risiko kegagalan pencapaian kinerja dan penyimpangan integritas dengan penyempurnaan peta risiko dan mitigasi risiko secara berkelanjutan,

No	Nama Unit Kerja	Nilai	Catatan Evaluator	Rekomendasi
			telah diimplementasikan; • Tidak terdapat peristiwa yang berdampak pada penurunan integritas hakim dan aparatur	khususnya terkait risiko integritas. • Mengembangkan inovasi yang unggul dibandingkan unit-unit kerja lain, layak menjadi percontohan, berkelanjutan, dan secara nyata efektif meningkatkan pencapaian kinerja utama serta kualitas pelayanan unit kerja • Melakukan sosialisasi kepada stakeholder/pengguna layanan atas inovasi yang ada sehingga dapat diketahui dan manfaat atas inovasi tersebut dapat dirasakan dan memberikan kemudahan bagi stakeholder/pen

No	Nama Unit Kerja	Nilai	Catatan Evaluator	Rekomendasi
				guna layanan Melakukan monitoring dan evaluasi atas inovasi sehingga dapat menjadi bahan koreksi dan perbaikan serta pengembangan inovasi kedepan.

2. Lingkungan Peradilan Agama

2.a. Pengadilan Tingkat Banding

No	Nama Unit Kerja	Nilai	Catatan Evaluator	Rekomendasi
1	Pengadilan Tinggi Agama Jambi	Pengungkit: 46,13 Hasil: 38,71 IPAK: 4 IPKP: 3,99 Nilai Total: 84,83	- Komitmen Pimpinan dan seluruh aparatur tergambar pada hasil <i>desk evaluation</i> – wawancara dan verifikasi lapangan; - Kinerja tahun 2023 telah tercapai; - Peningkatan Kualitas Layanan telah	- Meningkatkan kualitas implementasi SPBE sehingga mampu mendorong terjadinya percepatan dalam pelayanan publik yang lebih efisien - Mengembangkan inovasi yang unggul dibandingkan unit-unit kerja lain, layak dijadikan percontohan,

			diupayakan melalui sejumlah inovasi layanan dan telah diimplementasikan; • Tidak terdapat peristiwa yang berdampak pada penurunan integritas hakim dan aparatur	berkelanjutan, dan secara nyata efektif meningkatkan pencapaian kinerja utama serta kualitas pelayanan unit kerja; • Meningkatkan kerja sama dengan stakeholder yang terkait dengan core bisnis pengadilan dalam rangka pencapaian kinerja yang lebih baik,
--	--	--	--	--

2.b. Pengadilan Tingkat Pertama

No	Nama Unit Kerja	Nilai	Catatan Evaluator	Rekomendasi
1	Pengadilan Agama Andoolo	Pengungkit: 47,29 Hasil: 36,93 IPAK: 3,94 IPKP: 3,93 Nilai Total: 84,22	• Komitmen Pimpinan dan seluruh aparatur tergambar pada hasil <i>desk evaluation</i> – wawancara dan verifikasi lapangan; • Kinerja tahun 2023	• Meningkatkan kualitas implementasi SPBE sehingga mampu mendorong terjadinya percepatan dalam pelayanan publik yang lebih efisien • Mengembangkan inovasi yang

No	Nama Unit Kerja	Nilai	Catatan Evaluator	Rekomendasi
			telah tercapai; • Peningkatan Kualitas Layanan telah diupayakan melalui sejumlah inovasi layanan dan telah diimplementasikan; • Tidak terdapat peristiwa yang berdampak pada penurunan integritas hakim dan aparatur.	unggul dibandingkan unit-unit kerja lain, layak dijadikan percontohan, berkelanjutan, dan secara nyata efektif meningkatkan pencapaian kinerja utama serta kualitas pelayanan unit kerja; • Meningkatkan kerjasama dengan stakeholder yang terkait dengan core bisnis pengadilan dalam rangka pencapaian kinerja yang lebih baik
2	Pengadilan Agama Arga Makmur	Pengungkit: 51,68 Hasil: 38,44 IPAK: 3,98 IPKP: 3,95 Nilai Total: 90,12	• Komitmen Pimpinan dan seluruh aparatur tergambar pada hasil <i>desk evaluation</i> – wawancara	• Menyesuaikan kebijakan penanganan dan pelaporan gratifikasi dengan SK Kabawas Nomor 28 Tahun 2021 • Mengoptimalkan

No	Nama Unit Kerja	Nilai	Catatan Evaluator	Rekomendasi
			dan verifikasi lapangan; • Kinerja tahun 2023 telah tercapai; • Peningkatan Kualitas Layanan telah diupayakan melalui sejumlah inovasi layanan dan telah diimplementasikan; • Tidak terdapat peristiwa yang berdampak pada penurunan integritas hakim dan aparat.	internalisasi atas pembangunan ZI yang sudah dilakukan dan meningkatkan pengembangan manajemen risiko yang lebih dapat menghilangkan kemungkinan terjadinya risiko kegagalan pencapaian kinerja dan penyimpangan integritas dengan penyempurnaan peta risiko dan mitigasi risiko secara berkelanjutan, khususnya terkait risiko integritas. • Mengembangkan inovasi yang unggul dibandingkan unit-unit kerja lain, layak dijadikan percontohan, berkelanjutan,

No	Nama Unit Kerja	Nilai	Catatan Evaluator	Rekomendasi
				dan secara nyata efektif meningkatkan pencapaian kinerja utama serta kualitas pelayanan unit kerja; • Meningkatkan kerjasama dengan stakeholder yang terkait dengan core bisnis pengadilan dalam rangka pencapaian kinerja yang lebih baik.
3	Pengadilan Agama Atambua	Pengungkit: 44,78 Hasil: 35,66 IPAK: 3,79 IPKP: 3,79 Nilai Total: 80,44	• Komitmen Pimpinan dan seluruh aparatur tergambar pada hasil <i>desk evaluation</i> – wawancara dan verifikasi lapangan; • Kinerja tahun 2023 telah tercapai; • Peningkatan	• Menyesuaikan kebijakan penanganan dan pelaporan gratifikasi dengan SK Kabawas Nomor 28 Tahun 2021 • Mengoptimalkan internalisasi atas pembangunan ZI yang sudah dilakukan dan meningkatkan pengembangan manajemen

No	Nama Unit Kerja	Nilai	Catatan Evaluator	Rekomendasi
			Kualitas Layanan telah diupayakan melalui sejumlah inovasi layanan dan telah diimplementasikan; • Tidak terdapat peristiwa yang berdampak pada penurunan integritas hakim dan aparat.	risiko yang lebih dapat menghilangkan kemungkinan terjadinya risiko kegagalan pencapaian kinerja dan penyimpangan integritas dengan penyempurnaan peta risiko dan mitigasi risiko secara berkelanjutan, khususnya terkait risiko integritas. • Mengembangkan inovasi yang unggul dibandingkan unit-unit kerja lain, layak dijadikan percontohan, berkelanjutan, dan secara nyata efektif meningkatkan pencapaian kinerja utama serta kualitas pelayanan unit

No	Nama Unit Kerja	Nilai	Catatan Evaluator	Rekomendasi
				kerja; • Meningkatkan kerjasama dengan stakeholder yang terkait dengan core bisnis pengadilan dalam rangka pencapaian kinerja yang lebih baik.
4	Pengadilan Agama Badung	Pengungkit: 44,44 Hasil: 37,11 IPAK: 3,97 IPKP: 3,94 Nilai Total: 81,54	• Komitmen Pimpinan dan seluruh aparatur tergambar pada hasil <i>desk evaluation</i> – wawancara dan verifikasi lapangan; • Kinerja tahun 2023 telah tercapai; • Peningkatan Kualitas Layanan telah diupayakan melalui sejumlah inovasi	• Mengoptimalkan internalisasi atas pembangunan ZI yang sudah dilakukan dan meningkatkan pengembangan manajemen risiko yang lebih dapat menghilangkan kemungkinan terjadinya risiko kegagalan pencapaian kinerja dan penyimpangan integritas dengan penyempurnaan peta risiko dan mitigasi risiko secara

No	Nama Unit Kerja	Nilai	Catatan Evaluator	Rekomendasi
			layanan dan telah diimplementasikan; • Tidak terdapat peristiwa yang berdampak pada penurunan integritas hakim dan aparatur.	berkelanjutan, khususnya terkait risiko integritas. • Mengembangkan inovasi yang unggul dibandingkan unit-unit kerja lain, layak dijadikan percontohan, berkelanjutan, dan secara nyata efektif meningkatkan pencapaian kinerja utama serta kualitas pelayanan unit kerja; • Meningkatkan kerjasama dengan stakeholder yang terkait dengan core bisnis pengadilan dalam rangka pencapaian kinerja yang lebih baik.

No	Nama Unit Kerja	Nilai	Catatan Evaluator	Rekomendasi
5	Pengadilan Agama Barabai	Pengungkit: 52,01 Hasil: 36,89 IPAK: 3,95 IPKP: 3,91 Nilai Total: 88,90	• Komitmen Pimpinan dan seluruh aparatur tergambar pada hasil <i>desk evaluation</i> – wawancara dan verifikasi lapangan; • Kinerja tahun 2023 telah tercapai; • Peningkatan Kualitas Layanan telah diupayakan melalui sejumlah inovasi layanan dan telah diimplementasikan; • Tidak terdapat peristiwa yang berdampak pada penurunan integritas	• Mengoptimalkan internalisasi atas pembangunan ZI yang sudah dilakukan dan meningkatkan pengembangan manajemen risiko yang lebih dapat menghilangkan kemungkinan terjadinya risiko kegagalan pencapaian kinerja dan penyimpangan integritas dengan penyempurnaan peta risiko dan mitigasi risiko secara berkelanjutan, khususnya terkait risiko integritas. • Mengembangkan inovasi yang unggul dibandingkan unit-unit kerja lain, layak dijadikan percontohan, berkelanjutan,

No	Nama Unit Kerja	Nilai	Catatan Evaluator	Rekomendasi
			hakim dan aparaturnya.	dan secara nyata efektif meningkatkan pencapaian kinerja utama serta kualitas pelayanan unit kerja; • Meningkatkan kerjasama dengan stakeholder yang terkait dengan core bisnis pengadilan dalam rangka pencapaian kinerja yang lebih baik
6	Pengadilan Agama Batang	Pengungkit: 39,26 Hasil: 36,06 IPAK: 3,86 IPKP: 3,81 Nilai Total: 75,32	• Komitmen Pimpinan dan seluruh aparaturnya tergambar pada hasil <i>desk evaluation</i> – wawancara dan verifikasi lapangan; • Kinerja tahun 2023 telah tercapai; • Peningkatan	• Mengoptimalkan internalisasi atas pembangunan ZI yang sudah dilakukan dan meningkatkan pengembangan manajemen risiko yang lebih dapat menghilangkan kemungkinan terjadinya risiko kegagalan pencapaian kinerja dan

No	Nama Unit Kerja	Nilai	Catatan Evaluator	Rekomendasi
			Kualitas Layanan telah diupayakan melalui sejumlah inovasi layanan dan telah diimplementasikan; • Tidak terdapat peristiwa yang berdampak pada penurunan integritas hakim dan aparatur.	penyimpangan integritas dengan penyempurnaan peta risiko dan mitigasi risiko secara berkelanjutan, khususnya terkait risiko integritas. • Mengembangkan inovasi yang unggul dibandingkan unit-unit kerja lain, layak dijadikan percontohan, berkelanjutan, dan secara nyata efektif meningkatkan pencapaian kinerja utama serta kualitas pelayanan unit kerja; • Meningkatkan kerjasama dengan stakeholder yang terkait dengan core bisnis pengadilan dalam rangka

No	Nama Unit Kerja	Nilai	Catatan Evaluator	Rekomendasi
				pencapaian kinerja yang lebih baik
7	Pengadilan Agama Batulicin	Pengungkit: 48,60 Hasil: 37,41 IPAK: 3,99 IPKP: 3,99 Nilai Total: 86,01	• Komitmen Pimpinan dan seluruh aparatur tergambar pada hasil <i>desk evaluation</i> – wawancara dan verifikasi lapangan; • Kinerja tahun 2023 telah tercapai; • Peningkatan Kualitas Layanan telah diupayakan melalui sejumlah inovasi layanan dan telah diimplementasikan; • Tidak terdapat peristiwa yang berdampak	• Mengoptimalkan internalisasi atas pembangunan ZI yang sudah dilakukan dan meningkatkan pengembangan manajemen risiko yang lebih dapat menghilangkan kemungkinan terjadinya risiko kegagalan pencapaian kinerja dan penyimpangan integritas dengan penyempurnaan peta risiko dan mitigasi risiko secara berkelanjutan, khususnya terkait risiko integritas. • Mengembangkan inovasi yang unggul dibandingkan unit-unit kerja lain, layak

No	Nama Unit Kerja	Nilai	Catatan Evaluator	Rekomendasi
			pada penurunan integritas hakim dan aparatur.	dijadikan percontohan, berkelanjutan, dan secara nyata efektif meningkatkan pencapaian kinerja utama serta kualitas pelayanan unit kerja; • Meningkatkan kerjasama dengan stakeholder yang terkait dengan core bisnis pengadilan dalam rangka pencapaian kinerja yang lebih baik
8	Pengadilan Agama Boyolali	Pengungkit: 45,38 Hasil: 35,18 IPAK: 3,81 IPKP: 3,66 Nilai Total: 80,56	• Komitmen Pimpinan dan seluruh aparatur tergambar pada hasil <i>desk evaluation</i> – wawancara dan verifikasi lapangan; • Kinerja tahun 2023	• Agar dapat melaksanakan himbauan gratifikasi pada saat sidang pertama • Agar petugas yang bertugas pada meja PTSP sesuai dengan tag nama pada meja PTSP.

No	Nama Unit Kerja	Nilai	Catatan Evaluator	Rekomendasi
			telah tercapai; • Peningkatan Kualitas Layanan telah diupayakan melalui sejumlah inovasi layanan dan telah diimplementasikan; • Tidak terdapat peristiwa yang berdampak pada penurunan integritas hakim dan aparatur.	• Agar mendata tamu yang datang pada PA Boyolali sebagai bentuk pengendalian internal
9	Pengadilan Agama Cianjur	Pengungkit: 46,46 Hasil: 37,33 IPAK: 3,98 IPKP: 3,98 Nilai Total: 83,79	• Komitmen Pimpinan dan seluruh aparatur tergambar pada hasil <i>desk evaluation</i> – wawancara dan verifikasi lapangan;	• Mengoptimalkan internalisasi atas pembangunan ZI yang sudah dilakukan dan meningkatkan pengembangan manajemen risiko yang lebih dapat menghilangkan

No	Nama Unit Kerja	Nilai	Catatan Evaluator	Rekomendasi
			• Kinerja tahun 2023 telah tercapai; • Peningkatan Kualitas Layanan telah diupayakan melalui sejumlah inovasi layanan dan telah diimplementasikan; • Tidak terdapat peristiwa yang berdampak pada penurunan integritas hakim dan aparatur.	kemungkinan terjadinya risiko kegagalan pencapaian kinerja dan penyimpangan integritas dengan penyempurnaan peta risiko dan mitigasi risiko secara berkelanjutan, khususnya terkait risiko integritas. • Mengembangkan inovasi yang unggul dibandingkan unit-unit kerja lain, layak dijadikan percontohan, berkelanjutan, dan secara nyata efektif meningkatkan pencapaian kinerja utama serta kualitas pelayanan unit kerja; • Meningkatkan kerjasama

No	Nama Unit Kerja	Nilai	Catatan Evaluator	Rekomendasi
				dengan stakeholder yang terkait dengan core bisnis pengadilan dalam rangka pencapaian kinerja yang lebih baik
10	Pengadilan Agama Donggala	Pengungkit: 47,93 Hasil: 38,62 IPAK: 3,99 IPKP: 3,98 Nilai Total: 86,54	• Komitmen Pimpinan dan seluruh aparatur tergambar pada hasil <i>desk evaluation</i> – wawancara dan verifikasi lapangan; • Kinerja tahun 2023 telah tercapai; • Peningkatan Kualitas Layanan telah diupayakan melalui sejumlah inovasi layanan dan telah diimplement	• Meningkatkan kualitas implementasi SPBE sehingga mampu mendorong terjadinya percepatan dalam pelayanan publik yang lebih efisien • Mengembangkan inovasi yang unggul dibandingkan unit-unit kerja lain, layak dijadikan percontohan, berkelanjutan, dan secara nyata efektif meningkatkan pencapaian kinerja utama serta kualitas

No	Nama Unit Kerja	Nilai	Catatan Evaluator	Rekomendasi
			asikan; • Tidak terdapat peristiwa yang berdampak pada penurunan integritas hakim dan aparatur.	pelayanan unit kerja; • Meningkatkan kerjasama dengan stakeholder yang terkait dengan core bisnis pengadilan dalam rangka pencapaian kinerja yang lebih baik
11	Pengadilan Agama Gianyar	Pengungkit: 42,23 Hasil: 35,66 IPAK: 3,8 IPKP: 3,78 Nilai Total: 77,89	• Komitmen Pimpinan dan seluruh aparatur tergambar pada hasil <i>desk evaluation</i> – wawancara dan verifikasi lapangan; • Kinerja tahun 2023 telah tercapai; • Peningkatan Kualitas Layanan telah diupayakan melalui sejumlah	• Mengoptimalkan internalisasi atas pembangunan ZI yang sudah dilakukan dan meningkatkan pengembangan manajemen risiko yang lebih dapat menghilangkan kemungkinan terjadinya risiko kegagalan pencapaian kinerja dan penyimpangan integritas dengan penyempurnaan peta risiko dan mitigasi risiko

No	Nama Unit Kerja	Nilai	Catatan Evaluator	Rekomendasi
			inovasi layanan dan telah diimplementasikan; • Tidak terdapat peristiwa yang berdampak pada penurunan integritas hakim dan aparatur.	secara berkelanjutan, khususnya terkait risiko integritas. • Mengembangkan inovasi yang unggul dibandingkan unit-unit kerja lain, layak dijadikan percontohan, berkelanjutan, dan secara nyata efektif meningkatkan pencapaian kinerja utama serta kualitas pelayanan unit kerja; • Meningkatkan kerjasama dengan stakeholder yang terkait dengan core bisnis pengadilan dalam rangka pencapaian kinerja yang lebih baik

No	Nama Unit Kerja	Nilai	Catatan Evaluator	Rekomendasi
12	Pengadilan Agama Giri Menang	Pengungkit: 44,81 Hasil: 37,46 IPAK: 4 IPKP: 3,99 Nilai Total: 82,27	• Komitmen Pimpinan dan seluruh aparatur tergambar pada hasil <i>desk evaluation</i> – wawancara dan verifikasi lapangan; • Kinerja tahun 2023 telah tercapai; • Peningkatan Kualitas Layanan telah diupayakan melalui sejumlah inovasi layanan dan telah diimplementasikan; • Tidak terdapat peristiwa yang berdampak pada penurunan integritas	• Mengoptimalkan internalisasi atas pembangunan ZI yang sudah dilakukan dan meningkatkan pengembangan manajemen risiko yang lebih dapat menghilangkan kemungkinan terjadinya risiko kegagalan pencapaian kinerja dan penyimpangan integritas dengan penyempurnaan peta risiko dan mitigasi risiko secara berkelanjutan, khususnya terkait risiko integritas. • Mengembangkan inovasi yang unggul dibandingkan unit-unit kerja lain, layak dijadikan percontohan,

No	Nama Unit Kerja	Nilai	Catatan Evaluator	Rekomendasi
			hakim dan aparatur.	berkelanjutan, dan secara nyata efektif meningkatkan pencapaian kinerja utama serta kualitas pelayanan unit kerja; • Meningkatkan kerjasama dengan stakeholder yang terkait dengan core bisnis pengadilan dalam rangka pencapaian kinerja yang lebih baik
13	Pengadilan Agama Kayu Agung	Pengungkit: 42,94 Hasil: 36,74 IPAK: 3,89 IPKP: 3,65 Nilai Total: 79,68	• Komitmen Pimpinan dan seluruh aparatur tergambar pada hasil <i>desk evaluation</i> – wawancara dan verifikasi lapangan; • Kinerja tahun 2023 telah tercapai;	• Mengoptimalkan internalisasi atas pembangunan ZI yang sudah dilakukan dan meningkatkan pengembangan manajemen risiko yang lebih dapat menghilangkan kemungkinan terjadinya risiko kegagalan pencapaian

No	Nama Unit Kerja	Nilai	Catatan Evaluator	Rekomendasi
			• Peningkatan Kualitas Layanan telah diupayakan melalui sejumlah inovasi layanan dan telah diimplementasikan; • Tidak terdapat peristiwa yang berdampak pada penurunan integritas hakim dan aparatur.	kinerja dan penyimpangan integritas dengan penyempurnaan peta risiko dan mitigasi risiko secara berkelanjutan, khususnya terkait risiko integritas; • Mengembangkan inovasi yang unggul dibandingkan unit-unit kerja lain, layak dijadikan percontohan, berkelanjutan, dan secara nyata efektif meningkatkan pencapaian kinerja utama serta kualitas pelayanan unit kerja; • Meningkatkan kerjasama dengan stakeholder yang terkait dengan core bisnis

No	Nama Unit Kerja	Nilai	Catatan Evaluator	Rekomendasi
				pengadilan dalam rangka pencapaian kinerja yang lebih baik.
14	Pengadilan Agama Kota Madiun	Pengungkit: 45,94 Hasil: 35,58 IPAK: 3,83 IPKP: 3,73 Nilai Total: 81,51	• Komitmen Pimpinan dan seluruh aparatur tergambar pada hasil <i>desk evaluation</i> – wawancara dan verifikasi lapangan; • Kinerja tahun 2023 telah tercapai; • Peningkatan Kualitas Layanan telah diupayakan melalui sejumlah inovasi layanan dan telah diimplementasikan; • Tidak terdapat peristiwa	• Mengoptimalkan internalisasi atas pembangunan ZI yang sudah dilakukan dan meningkatkan pengembangan manajemen risiko yang lebih dapat menghilangkan kemungkinan terjadinya risiko kegagalan pencapaian kinerja dan penyimpangan integritas dengan penyempurnaan peta risiko dan mitigasi risiko secara berkelanjutan, khususnya terkait risiko integritas. • Mengembangkan inovasi yang unggul

No	Nama Unit Kerja	Nilai	Catatan Evaluator	Rekomendasi
			yang berdampak pada penurunan integritas hakim dan aparatur.	dibandingkan unit-unit kerja lain, layak dijadikan percontohan, berkelanjutan, dan secara nyata efektif meningkatkan pencapaian kinerja utama serta kualitas pelayanan unit kerja; • Meningkatkan kerjasama dengan stakeholder yang terkait dengan core bisnis pengadilan dalam rangka pencapaian kinerja yang lebih baik
15	Pengadilan Agama Luwuk	Pengungkit: 47,59 Hasil: 37,31 IPAK: 3,83 IPKP: 3,84 Nilai Total: 84,89	• Komitmen Pimpinan dan seluruh aparatur tergambar pada hasil <i>desk evaluation</i> – wawancara dan verifikasi	• Meningkatkan kualitas implementasi SPBE sehingga mampu mendorong terjadinya percepatan dalam pelayanan publik yang lebih

No	Nama Unit Kerja	Nilai	Catatan Evaluator	Rekomendasi
			lapangan; • Kinerja tahun 2023 telah tercapai; • Peningkatan Kualitas Layanan telah diupayakan melalui sejumlah inovasi layanan dan telah diimplementasikan; • Tidak terdapat peristiwa yang berdampak pada penurunan integritas hakim dan aparatur.	efisien • Mengembangkan inovasi yang unggul dibandingkan unit-unit kerja lain, layak dijadikan percontohan, berkelanjutan, dan secara nyata efektif meningkatkan pencapaian kinerja utama serta kualitas pelayanan unit kerja; • Meningkatkan kerjasama dengan stakeholder yang terkait dengan core bisnis pengadilan dalam rangka pencapaian kinerja yang lebih baik
16	Pengadilan Agama Mesuji	Pengungkit: 49,50 Hasil: 34,99 IPAK: 3,73 IPKP: 3,75 Nilai Total:	• Komitmen Pimpinan dan seluruh aparatur tergambar pada hasil	• Kebijakan terhadap pelaporan gratifikasi agar disusun sesuai dengan SK

No	Nama Unit Kerja	Nilai	Catatan Evaluator	Rekomendasi
		84,49	<i>desk evaluation</i> – wawancara dan verifikasi lapangan; • Kinerja tahun 2023 telah tercapai; • Peningkatan Kualitas Layanan telah diupayakan melalui sejumlah inovasi layanan dan telah diimplementasikan; • Tidak terdapat peristiwa yang berdampak pada penurunan integritas hakim dan aparat.	Kabawas Nomor 28 Tahun 2021; • Mengoptimalkan internalisasi atas pembangunan ZI yang sudah dilakukan dan meningkatkan pengembangan manajemen risiko yang lebih dapat menghilangkan kemungkinan terjadinya risiko kegagalan pencapaian kinerja dan penyimpangan integritas dengan penyempurnaan peta risiko dan mitigasi risiko secara berkelanjutan, khususnya terkait risiko integritas; • Mengembangkan inovasi yang unggul dibandingkan unit-unit kerja lain, layak

No	Nama Unit Kerja	Nilai	Catatan Evaluator	Rekomendasi
				dijadikan percontohan, berkelanjutan, dan secara nyata efektif meningkatkan pencapaian kinerja utama serta kualitas pelayanan unit kerja; • Meningkatkan kerjasama dengan stakeholder yang terkait dengan core bisnis pengadilan dalam rangka pencapaian kinerja yang lebih baik.
17	Pengadilan Agama Pacitan	Pengungkit: 41,63 Hasil: 37,24 IPAK: 3,98 IPKP: 3,96 Nilai Total: 78,86	• Komitmen Pimpinan dan seluruh aparatur tergambar pada hasil <i>desk evaluation</i> – wawancara dan verifikasi lapangan; • Kinerja tahun 2023	• Mengoptimalkan internalisasi atas pembangunan ZI yang sudah dilakukan dan meningkatkan pengembangan manajemen risiko yang lebih dapat menghilangkan kemungkinan terjadinya risiko

No	Nama Unit Kerja	Nilai	Catatan Evaluator	Rekomendasi
			telah tercapai; • Peningkatan Kualitas Layanan telah diupayakan melalui sejumlah inovasi layanan dan telah diimplementasikan; • Tidak terdapat peristiwa yang berdampak pada penurunan integritas hakim dan aparatur.	kegagalan pencapaian kinerja dan penyimpangan integritas dengan penyempurnaan peta risiko dan mitigasi risiko secara berkelanjutan, khususnya terkait risiko integritas. • Mengembangkan inovasi yang unggul dibandingkan unit-unit kerja lain, layak dijadikan percontohan, berkelanjutan, dan secara nyata efektif meningkatkan pencapaian kinerja utama serta kualitas pelayanan unit kerja; • Meningkatkan kerjasama dengan stakeholder yang

No	Nama Unit Kerja	Nilai	Catatan Evaluator	Rekomendasi
				terkait dengan core bisnis pengadilan dalam rangka pencapaian kinerja yang lebih baik
18	Pengadilan Agama Pematang Siantar	Pengungkit: 46,13 Hasil: 37,88 IPAK: 3,9 IPKP: 3,9 Nilai Total: 84,00	• Komitmen Pimpinan dan seluruh aparatur tergambar pada hasil <i>desk evaluation</i> – wawancara dan verifikasi lapangan; • Kinerja tahun 2023 telah tercapai; • Peningkatan Kualitas Layanan telah diupayakan melalui sejumlah inovasi layanan dan telah diimplementasikan;	• Mengoptimalkan internalisasi atas pembangunan ZI yang sudah dilakukan dan meningkatkan pengembangan manajemen risiko yang lebih dapat menghilangkan kemungkinan terjadinya risiko kegagalan pencapaian kinerja dan penyimpangan integritas dengan penyempurnaan peta risiko dan mitigasi risiko secara berkelanjutan, khususnya terkait risiko integritas.;

No	Nama Unit Kerja	Nilai	Catatan Evaluator	Rekomendasi
			Tidak terdapat peristiwa yang berdampak pada penurunan integritas hakim dan aparatur.	- Mengembangkan inovasi yang unggul dibandingkan unit-unit kerja lain, layak dijadikan percontohan, berkelanjutan, dan secara nyata efektif meningkatkan pencapaian kinerja utama serta kualitas pelayanan unit kerja; - Meningkatkan kerjasama dengan stakeholder yang terkait dengan core bisnis pengadilan dalam rangka pencapaian kinerja yang lebih baik.
19	Pengadilan Agama Sukabumi	Pengungkit: 40,43 Hasil: 34,70 IPAK: 3,72 IPKP: 3,64 Nilai Total: 75,13	Komitmen Pimpinan dan seluruh aparatur tergambar pada hasil <i>desk</i>	Mengoptimalkan internalisasi atas pembangunan ZI yang sudah dilakukan dan meningkatkan pengembangan

No	Nama Unit Kerja	Nilai	Catatan Evaluator	Rekomendasi
			<i>evaluation</i> – wawancara dan verifikasi lapangan; • Kinerja tahun 2023 telah tercapai; • Peningkatan Kualitas Layanan telah diupayakan melalui sejumlah inovasi layanan dan telah diimplementasikan; • Tidak terdapat peristiwa yang berdampak pada penurunan integritas hakim dan aparatur.	manajemen risiko yang lebih dapat menghilangkan kemungkinan terjadinya risiko kegagalan pencapaian kinerja dan penyimpangan integritas dengan penyempurnaan peta risiko dan mitigasi risiko secara berkelanjutan, khususnya terkait risiko integritas; • Mengembangkan inovasi yang unggul dibandingkan unit-unit kerja lain, layak dijadikan percontohan, berkelanjutan, dan secara nyata efektif meningkatkan pencapaian kinerja utama serta kualitas

No	Nama Unit Kerja	Nilai	Catatan Evaluator	Rekomendasi
				pelayanan unit kerja; • Meningkatkan kerjasama dengan stakeholder yang terkait dengan core bisnis pengadilan dalam rangka pencapaian kinerja yang lebih baik.
20	Pengadilan Agama Sukoharjo	Pengungkit: 43,76 Hasil: 35,58 IPAK: 3,83 IPKP: 3,73 Nilai Total: 79,34	• Komitmen Pimpinan dan seluruh aparatur tergambar pada hasil <i>desk evaluation</i> – wawancara dan verifikasi lapangan; • Kinerja tahun 2023 telah tercapai; • Peningkatan Kualitas Layanan telah diupayakan melalui sejumlah	• Agar dapat dibuat latar belakang pembuatan inovasi • Agar dapat ditempatkan prosedur pengaduan pada ruang sidang • Agar mendata tamu yang datang pada PA Sukoharjo sebagai bentuk pengendalian internal

No	Nama Unit Kerja	Nilai	Catatan Evaluator	Rekomendasi
			inovasi layanan dan telah diimplementasikan; • Tidak terdapat peristiwa yang berdampak pada penurunan integritas hakim dan aparatur.	
21	Pengadilan Agama Tanjung Karang	Pengungkit: 44,40 Hasil: 36,01 IPAK: 3,83 IPKP: 3,83 Nilai Total: 80,41	• Komitmen Pimpinan dan seluruh aparatur tergambar pada hasil <i>desk evaluation</i> – wawancara dan verifikasi lapangan; • Kinerja tahun 2023 telah tercapai; • Peningkatan Kualitas Layanan telah diupayakan	• Mengoptimalkan internalisasi atas pembangunan ZI yang sudah dilakukan dan meningkatkan pengembangan manajemen risiko yang dapat menghilangkan kemungkinan terjadinya risiko kegagalan pencapaian kinerja dan penyimpangan integritas dengan penyempurnaan peta risiko dan

No	Nama Unit Kerja	Nilai	Catatan Evaluator	Rekomendasi
			melalui sejumlah inovasi layanan dan telah diimplementasikan; • Tidak terdapat peristiwa yang berdampak pada penurunan integritas hakim dan aparatur.	mitigasi risiko secara berkelanjutan, khususnya terkait risiko integritas. • Mengembangkan inovasi yang unggul dibandingkan unit-unit kerja lain, layak dijadikan percontohan, berkelanjutan, dan secara nyata efektif meningkatkan pencapaian kinerja utama serta kualitas pelayanan unit kerja; • Meningkatkan kerjasama dengan stakeholder yang terkait dengan core bisnis pengadilan dalam rangka pencapaian kinerja yang lebih baik.

No	Nama Unit Kerja	Nilai	Catatan Evaluator	Rekomendasi
22	Pengadilan Agama Tilamuta	Pengungkit: 41,70 Hasil: 36,93 IPAK: 3,94 IPKP: 3,93 Nilai Total: 78,63	• Komitmen Pimpinan dan seluruh aparatur tergambar pada hasil <i>desk evaluation</i> – wawancara dan verifikasi lapangan; • Kinerja tahun 2023 telah tercapai; • Peningkatan Kualitas Layanan telah diupayakan melalui sejumlah inovasi layanan dan telah diimplementasikan; • Tidak terdapat peristiwa yang berdampak pada penurunan integritas	• Mengoptimalkan internalisasi atas pembangunan ZI yang sudah dilakukan dan meningkatkan pengembangan manajemen risiko yang dapat menghilangkan kemungkinan terjadinya risiko kegagalan pencapaian kinerja dan penyimpangan integritas dengan penyempurnaan peta risiko dan mitigasi risiko secara berkelanjutan, khususnya terkait risiko integritas. • Mengembangkan inovasi yang unggul dibandingkan unit-unit kerja lain, layak dijadikan percontohan, berkelanjutan,

No	Nama Unit Kerja	Nilai	Catatan Evaluator	Rekomendasi
			hakim dan aparaturnya.	dan secara nyata efektif meningkatkan pencapaian kinerja utama serta kualitas pelayanan unit kerja; • Meningkatkan kerjasama dengan stakeholder yang terkait dengan core bisnis pengadilan dalam rangka pencapaian kinerja yang lebih baik.

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,



SUGIYANTO